

# PERAN KRUSIAL PERBANKAN DALAM MEMUTUS MATA RANTAI TRANSAKSI DAN PERKEMBANGAN JUDI ONLINE

**IRGI PRAYOGO<sup>1</sup>, SUGIANTO<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email : [sugianto@uinsu.ac.id](mailto:sugianto@uinsu.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik peran perbankan dalam memutus mata rantai transaksi judi online di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus empat bank nasional, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen, penelitian ini mengkaji mekanisme deteksi dan pencegahan transaksi mencurigakan, kendala dan tantangan yang dihadapi perbankan, kebijakan dan regulasi terkait, dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, serta peran teknologi dalam membantu perbankan mengidentifikasi pola transaksi judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran vital dalam menjaga integritas sistem keuangan dari dampak negatif judi online, namun masih terdapat berbagai tantangan seperti kompleksitas skema kejahatan, perkembangan teknologi yang pesat, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara perbankan, regulator, dan penegak hukum, serta adopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan blockchain, untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan judi online di Indonesia.

**Kata kunci:** perbankan, judi online, deteksi transaksi, OJK, PPATK

## ABSTRACT

*This study aims to specifically analyze the role of the banking sector in disrupting the chain of online gambling transactions in Indonesia, with a focus on four national banks: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), and Bank Syariah Indonesia (BSI). Using a qualitative approach and document analysis method, this research examines the mechanisms for detecting and preventing suspicious transactions, the challenges faced by banks, the related policies and regulations, the impact on financial system stability, and the role of technology in helping banks identify patterns of online gambling transactions. The findings show that banks play a vital role in safeguarding the integrity of the financial system from the negative impacts of online gambling. However, they face significant challenges, including complex crime schemes, rapid technological advancement, and limited resources. Therefore, strong synergy between banks, regulators, and law enforcement agencies is essential, along with the adoption of advanced technologies such as artificial intelligence and blockchain, to enhance the effectiveness of efforts to combat online gambling in Indonesia.*

**Keywords:** banking, online gambling, transaction detection, OJK, PPATK

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perjudian yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (**Kartono, 2011**). Munculnya platform online telah memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis permainan judi, sehingga praktik ini semakin meluas dan mengkhawatirkan. Judi online telah berkembang pesat, tercermin dari nilai transaksi yang sangat besar, menurut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) perputaran uang dalam judi online di Indonesia mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023 (**PPATK, 2024**). Skala transaksi ini mengindikasikan tingkat partisipasi yang luas, menjadikannya isu sistemik dengan potensi besar untuk kejahatan finansial dan kerugian sosial. Di Indonesia, maraknya perjudian online tidak hanya menjadi masalah sosial yang serius, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan negara. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian online, seperti penyalahgunaan dana, kecanduan, dan kerugian finansial yang dapat merusak stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam memutus mata rantai transaksi judi online. Perbankan di Indonesia memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengontrol transaksi keuangan yang terkait dengan praktik perjudian online. Upaya ini melibatkan berbagai mekanisme, mulai dari pemantauan transaksi secara rutin hingga penerapan teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sebagai contoh, beberapa bank besar seperti BRI, BNI, BCA, dan BSI telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam memblokir ribuan rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online.

Sebagai contoh, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat telah membekukan lebih dari 1.000 rekening nasabah yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi online dari Juli 2023 hingga Juni 2024. BRI menggunakan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan secara internal untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang menyimpang dari profil nasabah. Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI) menerapkan kebijakan automated transaction pattern recognition, yaitu sistem yang mampu mengenali pola-pola deposit dan penarikan dana tidak wajar yang sering terjadi pada malam hari atau dalam jumlah yang berulang-ulang. Dalam periode yang sama, BNI juga telah memblokir ratusan rekening. Bank Central Asia (BCA) memiliki pendekatan berbeda melalui kerja sama intensif dengan OJK dan Kominfo. Mereka membangun sistem pelaporan otomatis yang terintegrasi langsung dengan PPATK untuk memastikan pelaporan rekening yang dicurigai berjalan secara real-time. Bank Syariah Indonesia (BSI), di sisi lain, menerapkan prinsip kehati-hatian ekstra dalam proses know your customer (KYC) dan enhanced due diligence (EDD), karena keterkaitan erat antara prinsip syariah dengan pelarangan perjudian dalam Islam. BSI juga memperkuat verifikasi identitas dan sumber dana dalam layanan digital banking-nya. Tindakan ini menunjukkan keseriusan perbankan dalam mendukung upaya pemberantasan judi online yang dicanangkan oleh pemerintah dan regulator. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh perbankan dalam menjalankan perannya tersebut. Salah satunya adalah sulitnya mendeteksi transaksi yang terkait dengan judi online karena sering kali dilakukan secara anonim dan tidak terdeteksi oleh sistem perbankan konvensional. Berbagai penelitian telah menggarisbawahi ketergantungan aktivitas perjudian online terhadap layanan perbankan. Transaksi deposit, penarikan dana, dan berbagai aktivitas keuangan lainnya yang terkait dengan perjudian online semuanya dilakukan melalui lembaga perbankan. Hal ini menjadikan perbankan sebagai titik krusial yang dapat dimanfaatkan untuk membendung aliran dana yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut. Namun, hingga saat

ini masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi perbankan dalam upaya memerangi praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam peran perbankan dalam memutus mata rantai transaksi judi online, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya tersebut, serta mengidentifikasi kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan dan regulator untuk meningkatkan efektivitas dalam memerangi praktik perjudian online.

Pentingnya peran perbankan dalam memerangi perjudian online telah diakui oleh berbagai pihak, termasuk regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam lingkup mikro prudensial, OJK mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan Pengawasan guna membantu lembaga keuangan tetap sehat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, yang meliputi pembinaan dan pengelolaan dari sudut kelembagaan dan kehati-hatian (**Sinaga, O.C.S.2023**). OJK telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan imbauan kepada lembaga perbankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi yang terkait dengan perjudian online (**Kadir Arno 2017**). Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh perbankan dalam menjalankan tugas ini. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas skema yang digunakan oleh pelaku judi online untuk menyamarkan transaksi mereka. Selain itu, pertumbuhan teknologi yang sangat cepat juga membuat pelaku judi online semakin inovatif dalam mencari celah untuk menghindari deteksi selain masalah utama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran krusial perbankan dalam memutus mata rantai transaksi judi online. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji:

- Mekanisme deteksi dan pencegahan: Bagaimana perbankan mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan terkait dengan judi online? Apa saja indikator yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan tersebut? Bagaimana perbankan bekerja sama dengan pihak berwenang (seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan – PPATK) dalam menindaklanjuti temuan tersebut?
- Kendala dan tantangan: Apa saja kendala teknis, operasional, dan regulasi yang dihadapi perbankan dalam upaya mencegah transaksi judi online? Bagaimana perkembangan teknologi seperti cryptocurrency dan dompet digital mempengaruhi upaya pencegahan tersebut?
- Kebijakan dan regulasi: Kebijakan dan regulasi apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk membatasi transaksi judi online? Sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mencegah praktik perjudian online? Apakah terdapat celah atau kelemahan dalam regulasi yang ada?
- Dampak terhadap stabilitas sistem keuangan: Bagaimana aktivitas judi online dapat mengancam stabilitas sistem keuangan? Apa saja risiko yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang sering kali dikaitkan dengan perjudian online?
- Peran teknologi: Bagaimana teknologi seperti artificial intelligence (AI), machine learning, dan big data dapat dimanfaatkan oleh perbankan untuk meningkatkan akurasi deteksi dan pencegahan transaksi judi online?

Meskipun demikian, perbankan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas perjudian online. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan big data analytics, perbankan dapat mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih dan efektif. Selain itu, kerja sama yang erat antara perbankan, regulator, dan penegak hukum juga sangat diperlukan untuk membongkar jaringan perjudian online yang semakin terorganisir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memerangi praktik perjudian online di Indonesia dan mampu

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran krusial perbankan dalam memutus mata rantai transaksi judi online di Indonesia. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek terkait, mulai dari mekanisme deteksi dan pencegahan yang diterapkan oleh perbankan, kendala-kendala yang dihadapi, hingga dampak dari upaya tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran perbankan dalam menjaga integritas sistem keuangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen untuk mengeksplorasi peran perbankan dalam memutus mata rantai transaksi judi online di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang kompleks, dengan mengandalkan data non-numerik dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer meliputi laporan tahunan dan kebijakan internal bank yang menjadi fokus studi, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang memuat informasi mengenai strategi dan mekanisme deteksi transaksi mencurigakan. Sementara itu, dokumen sekunder meliputi regulasi pemerintah (seperti UU ITE dan Peraturan OJK), laporan lembaga pengawas seperti PPATK, artikel jurnal ilmiah, serta berita dari media nasional yang relevan.

Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi jenis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran melalui situs resmi lembaga terkait, database jurnal ilmiah, serta portal berita daring. Dokumen yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan waktu penerbitan (dibatasi antara tahun 2019 hingga 2024). Setelah itu, dokumen dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi pembacaan menyeluruh, pemberian kode awal terhadap bagian-bagian penting dokumen, pengelompokan kode ke dalam kategori tematik seperti "deteksi transaksi judi online", "kebijakan bank", "tantangan teknologi", dan "koordinasi antar lembaga", serta penyusunan pola-pola temuan yang berulang.

Untuk memperkuat validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen, misalnya mencocokkan data dari laporan bank dengan laporan PPATK dan pernyataan regulator seperti OJK. Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis strategi masing-masing bank dalam menangani transaksi judi online, karena setiap bank memiliki kebijakan dan pendekatan teknologi yang berbeda. BRI, misalnya, memanfaatkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk memantau pola transaksi tidak wajar; BNI mengembangkan pengenalan pola otomatis berbasis waktu dan volume transaksi; sementara BCA lebih menitikberatkan pada pelaporan real-time melalui integrasi sistem dengan PPATK; dan BSI memperkuat prosedur due diligence sesuai prinsip perbankan syariah. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan analisis yang mendalam, sistematis, dan akurat mengenai peran perbankan dalam memberantas praktik judi online melalui pendekatan berbasis data dan dokumen resmi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran krusial perbankan dalam memutus mata rantai transaksi judi online merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memerangi praktik perjudian online di Indonesia. Perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi dan mengontrol transaksi keuangan yang terkait dengan praktik perjudian online. Dalam konteks ini, terdapat beberapa landasan teori yang dapat digunakan untuk mendukung pemahaman mengenai peran perbankan dalam memerangi praktik perjudian online.

#### 3.1 Mekanisme Deteksi Dan Pencegahan Transaksi Judi Online Oleh Perbankan

Perbankan memiliki peran krusial dalam memutus mata rantai transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa hampir seluruh aktivitas judi online sangat bergantung pada layanan sistem pembayaran perbankan, baik dalam bentuk transfer, deposit, maupun penarikan dana. Hal ini menjadikan bank sebagai titik intervensi strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik perjudian daring. Namun demikian, kompleksitas skema penyamaran, evolusi teknologi finansial, serta keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan utama dalam mendeteksi dan menghentikan aliran dana ilegal tersebut. Merujuk pada data resmi, sejak Juni 2023, PPATK telah mengidentifikasi sekitar 4.000 hingga 5.000 rekening bank yang diduga kuat digunakan dalam aktivitas judi online. Rekening-rekening ini dibekukan sementara selama 20 hari untuk proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri, dan bila tidak ada sanggahan dalam 30 hari, aset dalam rekening tersebut dapat disita oleh negara. Menyusul laporan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa lebih dari 6.000 rekening telah diblokir oleh lembaga perbankan, berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. OJK juga meminta bank untuk menutup rekening lain yang terkait dengan data nasabah yang sama guna mencegah pembukaan kembali jalur transaksi oleh pelaku.

Dalam konteks ini, berbagai bank nasional menerapkan mekanisme deteksi dan pencegahan secara berbeda sesuai dengan sistem teknologi dan kebijakan internal masing-masing. Bank Rakyat Indonesia (BRI), misalnya, menggunakan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi anomali transaksi. Sejak Juli 2023 hingga Juni 2024, BRI telah membekukan lebih dari 1.000 rekening yang dicurigai digunakan untuk judi online. Sistem AI yang diterapkan mampu mengenali penyimpangan pola transaksi nasabah, seperti lonjakan tiba-tiba dalam nominal transaksi, atau frekuensi transfer ke rekening virtual yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

Bank Negara Indonesia (BNI) mengambil pendekatan berbasis analisis waktu dan volume transaksi (*time-based anomaly detection*). BNI memprioritaskan pemantauan terhadap transaksi yang berlangsung pada waktu-waktu mencurigakan—seperti malam hari atau akhir pekan—serta terhadap rekening yang menunjukkan aktivitas keuangan yang berulang dan tidak proporsional. Selain itu, BNI berkoordinasi aktif dengan Kominfo dan PPATK dalam mendapatkan data blacklist situs dan rekening terafiliasi.

Sementara itu, Bank Central Asia (BCA) mengandalkan teknologi transaction mapping dan network analysis, yang mampu memetakan hubungan antara satu rekening dengan rekening lainnya. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi jaringan rekening fiktif atau rekening yang dikendalikan oleh satu entitas pelaku kejahatan. BCA juga menerapkan pemantauan berbasis lokasi (*geo-location alerts*), di mana transaksi yang dilakukan dari lokasi berbeda secara drastis dengan domisili nasabah akan menimbulkan peringatan dini.

Adapun Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bank berbasis prinsip Islam, memperkuat aspek Know Your Customer (KYC) dan Enhanced Due Diligence (EDD). BSI menolak pembukaan rekening oleh individu yang tidak memenuhi standar etika tertentu dan melakukan verifikasi ketat terhadap transaksi yang masuk dan keluar dari rekening nasabah. Fokus BSI lebih banyak pada pencegahan dari sisi pembukaan rekening dan pemantauan dana masuk, dengan memperhatikan keterkaitan aktivitas transaksi dengan situs-situs yang dilarang menurut fatwa dan regulasi pemerintah.

Secara umum, perbankan melakukan monitoring pola transaksi sebagai mekanisme utama dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. Beberapa metode yang digunakan antara lain: (1) analisis profil nasabah, dengan membandingkan transaksi aktual terhadap kebiasaan historis; (2) deteksi lonjakan nominal secara tiba-tiba atau transfer dengan jumlah tetap dan berulang; (3) analisis jaringan transaksi, untuk mengidentifikasi hubungan antara rekening nasabah dengan pihak ketiga; dan (4) pemantauan waktu transaksi, seperti transaksi yang dilakukan di luar jam operasional normal (**Alfa N., 2019**). Indikator umum yang sering digunakan untuk mendeteksi transaksi judi online mencakup: adanya transfer ke situs atau akun pembayaran yang teridentifikasi sebagai penyedia layanan judi online, penggunaan identitas fiktif atau tidak konsisten, ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar, serta koneksi dengan individu atau jaringan yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian. Atas dasar ini, OJK mewajibkan semua bank untuk menerapkan prosedur EDD terhadap rekening yang mencurigakan. Prosedur ini membantu bank memahami latar belakang transaksi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).

Indikator transaksi mencurigakan terkait judi online merupakan kunci dalam upaya pencegahan penyalahgunaan sistem perbankan untuk kegiatan ilegal. Beberapa indikator yang sering digunakan antara lain transaksi ke atau dari situs atau akun yang teridentifikasi terkait dengan judi online, transaksi anonim menggunakan identitas palsu, volume transaksi yang tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran, serta adanya hubungan dengan individu atau organisasi yang diketahui terlibat dalam aktivitas perjudian. Monitoring pola transaksi secara efektif menjadi langkah krusial dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan secara dini, mencegah pencucian uang, dan melindungi reputasi perbankan. OJK juga mengamanatkan bank untuk melakukan enhanced due diligence (EDD) pada rekening yang mencurigakan. EDD membantu bank untuk lebih memahami sifat transaksi dan mengidentifikasi potensi keterkaitan dengan aktivitas ilegal seperti judi online. Prosedur EDD yang kuat sangat penting untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian, perbankan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah dampak negatif dari perjudian online (**OJK, 2023**). Dengan kombinasi antara sistem pemantauan internal, kerja sama antarlembaga, dan peningkatan kapasitas SDM, perbankan di Indonesia terus mengembangkan mekanisme pencegahan yang adaptif terhadap perubahan modus operandi pelaku judi online. Namun demikian, efektivitas deteksi masih sangat bergantung pada kelengkapan data, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan bank dalam memproses informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, pendekatan teknologi dan kebijakan perlu berjalan seiring untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional.

### **3.2 Kendala Dan Tantangan Yang Di Hadapi Bank Dalam Memberantas Judi Online**

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi perbankan dalam memerangi judi online adalah evolusi yang cepat dan kompleksitas skema yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Pelaku judi online terus beradaptasi dengan regulasi yang ada dengan mengembangkan metode

penyamaran yang semakin canggih. Penggunaan mata uang kripto, dompet digital, dan layanan pembayaran online yang tidak ter regulasi menjadi tren yang semakin populer di kalangan pelaku kejahatan, seperti yang dijelaskan dalam laporan (**PPATK 2020**) Perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang keuangan digital, juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah-celah sistem. Hal ini diperparah dengan adanya jaringan kejahatan transnasional yang terorganisir, seperti yang diungkapkan oleh (**Interpol 2021**) Transaksi lintas batas dan keterlibatan operator judi yang berbasis di luar negeri juga menghadirkan tantangan signifikan. Kerja sama dan pertukaran informasi internasional sangat penting tetapi bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Perbedaan dalam regulasi dan yurisdiksi antar negara semakin mempersulit upaya pemberantasan. Akibatnya, perbankan dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan sistem deteksi yang lebih canggih untuk dapat mengimbangi perkembangan modus operasi pelaku kejahatan.

Potensi pencucian uang melalui judi online juga mempersulit pelacakan asal dan tujuan dana. Judi online dapat dieksploitasi untuk mencuci hasil kejahatan lain, yang semakin memperumit proses deteksi. Bank perlu waspada dalam mengidentifikasi transaksi yang mungkin mengindikasikan aktivitas pencucian uang terkait dengan judi online. Masalah "rekening mule" atau penjualan rekening bank untuk memfasilitasi transaksi ilegal juga menjadi perhatian . Penggunaan rekening pihak ketiga menambah lapisan kompleksitas lain dalam melacak dan mengganggu transaksi judi online. Bank perlu memperkuat prosedur KYC (*Know Your Customer*) mereka dan menerapkan langkah-langkah untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan rekening mule. Pelatihan dan kesadaran yang berkelanjutan di antara staf bank sangat penting untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan terkait dengan judi online . Kewaspadaan manusia tetap menjadi komponen penting dari strategi anti-judi online yang efektif di bank. Staf yang terlatih lebih mampu mengenali tanda bahaya dan melaporkan transaksi mencurigakan yang mungkin terlewat oleh sistem otomatis. Terakhir, bank menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan privasi pelanggan dengan kebutuhan pemantauan yang efektif . Penerapan langkah-langkah anti-judi online yang kuat harus dilakukan dengan cara yang menghormati kewajiban hukum dan etika terkait perlindungan data pelanggan. Menemukan keseimbangan yang tepat antara keamanan dan privasi merupakan pertimbangan utama bagi bank dalam mengembangkan strategi anti-judi online mereka

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala signifikan bagi perbankan, terutama bagi lembaga keuangan berskala kecil, dalam memerangi judi online. Tidak semua bank memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk menganalisis data transaksi secara mendalam dan mendeteksi pola yang mencurigakan. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam bidang analisis data dan keamanan siber juga memperparah situasi. Dinamika regulasi yang terus berubah juga menjadi tantangan tersendiri, karena perbankan harus secara berkala menyesuaikan prosedur dan sistem mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi evolusi kejahatan siber. Hal ini menuntut investasi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta adaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis.

### **3.3 Kebijakan Dan Regulasi Terkait Pencegahan Dan Pemberantasan Judi Online**

OJK memegang peran dan kewenangan penting dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan untuk memerangi judi online . Mandat dan kewenangan khusus OJK sangat penting bagi kerangka regulasi untuk mengatasi judi online di sektor keuangan. Memahami kerangka hukum dan kemampuan penegakan hukum OJK sangat penting untuk menilai efektivitas

peraturan yang berlaku. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya mengriminalisasi aktivitas judi online. Larangan hukum terhadap judi online menjadi dasar bagi tindakan regulasi dan upaya penegakan hukum (**Parandita, 2023**). Meskipun UU ITE menargetkan operator dan peserta judi online, penegakannya sebagian bergantung pada penghentian aliran dana melalui sistem perbankan. Salah satu contohnya yaitu Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana judi online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE Melarang pendistribusian, pentransmisian, dan/atau pembuatan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE Digunakan dalam konteks gabungan dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk menjerat bandar judi online. Pelaku judi online dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (**Marsela 2023**).

Peraturan dan kebijakan spesifik OJK bertujuan untuk mencegah dan memerangi judi online, seperti arahan untuk pemblokiran rekening dan *enhanced due diligence*. Peraturan khusus ini menguraikan langkah-langkah konkret yang diharapkan diambil oleh bank dalam perang melawan judi online. Menganalisis ruang lingkup dan efektivitas peraturan ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi celah dan area untuk perbaikan. Kerja sama antara OJK dan badan pemerintah lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan PPATK juga krusial. Pendekatan multi-lembaga yang terkoordinasi sangat penting untuk mengatasi isu kompleks judi online secara efektif. Pertukaran informasi dan operasi gabungan antara badan pengatur, penegak hukum, dan unit intelijen keuangan sangat penting untuk mengganggu jaringan judi online. Potensi untuk memasukkan daftar hitam individu yang terlibat dalam pelanggaran berat agar tidak dapat membuka rekening bank baru juga menjadi pertimbangan. Daftar hitam dapat berfungsi sebagai pencegah dan mencegah pelaku berulang menggunakan sistem perbankan untuk aktivitas ilegal. Efektivitas daftar hitam bergantung pada kelengkapan daftar dan kepatuhan semua lembaga keuangan terhadapnya. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti yang diungkapkan dalam laporan PPATK (2020), menjadi kendala utama dalam menindak pelaku judi online yang beroperasi secara lintas batas. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat dan semakin canggihnya modus operandi pelaku kejahatan, seperti yang ditekankan dalam penelitian (**Smith et al. 2018**), membuat upaya penegakan hukum menjadi semakin sulit. Pelaku judi online sering kali memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan mata uang kripto dan jaringan anonim. Dalam konteks ini, perbankan memiliki peran yang sangat krusial. Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, perbankan dapat melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah secara real-time dan mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, seperti transaksi yang berulang ke situs judi online atau transaksi dengan volume yang tidak wajar. Namun, perbankan juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, dinamika regulasi yang terus berubah, dan kompleksitas skema yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memutus mata rantai transaksi judi online secara efektif.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga memperumit permasalahan ini. Pelaku judi online terus berinovasi dengan menciptakan produk-produk baru dan metode pembayaran yang semakin canggih, sehingga regulasi yang ada seringkali tertinggal dan tidak mampu mengikuti perkembangan terbaru. Akibatnya, perbankan sering kali menghadapi dilema dalam menentukan apakah suatu transaksi bersifat legal atau ilegal. Dalam konteks ini, perbankan membutuhkan panduan yang lebih jelas dan spesifik dari regulator untuk dapat menjalankan

tugasnya dengan efektif. Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang lebih erat antara perbankan, pemerintah, dan penyedia layanan internet untuk mengembangkan sistem deteksi yang lebih canggih dan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk aktivitas judi online, termasuk yang memanfaatkan teknologi terbaru.

### **3.4 Dampak Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia**

Laporan ini menganalisis dampak signifikan dari judi online terhadap stabilitas keuangan Indonesia. Skala transaksi judi online telah meningkat secara eksponensial, mencapai Rp 600 triliun pada triwulan pertama tahun 2024 saja. Aliran dana dari aktivitas ini sebagian besar mengalir ke luar negeri, menimbulkan kekhawatiran terhadap neraca pembayaran dan cadangan devisa negara. Judi online juga berdampak negatif terhadap perilaku konsumsi dan tingkat tabungan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan. Jutaan warga Indonesia terjerat masalah keuangan akibat judi online, yang berkontribusi pada masalah sosial yang lebih luas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi dan membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online, efektivitasnya masih terbatas karena tantangan penegakan hukum dan sifat lintas batas dari aktivitas ini. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa judi online, meskipun dapat menghasilkan pendapatan, juga membawa risiko signifikan terhadap stabilitas keuangan individu dan negara. Laporan ini menyimpulkan bahwa judi online menimbulkan risiko jangka panjang yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia, termasuk peningkatan kejahatan keuangan, ketidakstabilan makroekonomi, dan erosi modal manusia. Rekomendasi terperinci ditujukan kepada pembuat kebijakan dan regulator untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan langkah-langkah regulasi, fokus pada pencegahan dan pendidikan, serta mempertimbangkan potensi legalisasi dengan hati-hati.

Selain itu Jumlah Individu yang Terlibat Menko Polkam melaporkan bahwa 8,8 juta warga Indonesia terlibat dalam judi online per November 2024 . PPATK mengidentifikasi 3,2 juta pemain dalam data tahun 2023 mereka dan 3,4 juta pada Juli 2024 .Jutaan warga Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam judi online, menunjukkan masalah yang meluas. Perbedaan dalam angka mungkin disebabkan oleh periode pelaporan dan metodologi yang berbeda. Besarnya jumlah peserta menyoroti skala potensi masalah keuangan dan sosial yang terkait dengan judi online di sebagian besar populasi. Data PPATK juga menunjukkan bahwa 80% penjudi online berasal dari kalangan berpenghasilan rendah . Ini mengindikasikan bahwa judi online secara tidak proporsional memengaruhi populasi rentan yang paling tidak mampu menanggung kerugian finansial. Keterlibatan persentase besar individu berpenghasilan rendah sangat mengkhawatirkan karena kerugian akibat perjudian dapat semakin mendorong mereka ke dalam kemiskinan dan memperburuk ketidakselarasan ekonomi yang ada.

Maraknya aktivitas judi online yang terjadi di Indonesia memicu terjadinya sejumlah masalah sosial, mulai dari pencurian hingga pembunuhan. Berbagai hal menjadi motif seseorang melakukan judi online, mulai dari kesulitan ekonomi, kecanduan, hingga rendahnya literasi keuangan (**Subagyo 2022**). Aktivitas perjudian online, selain merugikan individu, juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Seperti yang telah banyak diteliti, perjudian online seringkali menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang (**Jessy Azahra,2023**). Proses pencucian uang dalam konteks ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui transaksi judi, penyembunyian jejak dana melalui serangkaian transaksi yang kompleks, hingga mengintegrasikan dana tersebut ke dalam kegiatan ekonomi yang legal. Hal ini tidak hanya merusak integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membiayai kegiatan kriminal lainnya yang lebih berbahaya. Dalam konteks ini, perbankan memiliki peran

yang sangat krusial. Sebagai institusi yang menjadi gerbang utama dalam sistem pembayaran, perbankan memiliki akses langsung terhadap aliran dana yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, perbankan dapat mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar dan melaporkan kepada pihak berwenang. Namun, upaya pemberantasan pencucian uang melalui judi online menghadapi sejumlah tantangan, seperti Kurangnya koordinasi antar lembaga, perkembangan teknologi yang cepat, dan kompleksitas skema yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memutus mata rantai pencucian uang melalui judi online dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional **(Putra & Lyanthi, 2024)**.

Selain mengancam kesejahteraan masyarakat, dana yang diperoleh dari kegiatan perjudian ilegal ini juga memiliki potensi besar untuk disalahgunakan guna mendanai kegiatan terorisme. Seperti yang telah ditegaskan dalam berbagai laporan, termasuk laporan **(PPATK 2020)**, organisasi teroris seringkali memanfaatkan platform judi online sebagai sarana untuk mengumpulkan dana secara cepat dan anonim. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dalam konteks ini, perbankan memiliki peran yang sangat krusial. Sebagai institusi yang menjadi gerbang utama dalam aliran dana, perbankan dapat berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dana hasil judi online untuk tujuan-tujuan yang merugikan. Namun, upaya ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, perkembangan teknologi yang pesat, dan kompleksitas skema yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memutus mata rantai pendanaan terorisme melalui aktivitas judi online dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Dampak terhadap Reputasi Sistem Keuangan, Maraknya aktivitas judi online dapat merusak reputasi sistem keuangan suatu negara. Investor asing akan enggan menanamkan modal di negara yang dianggap memiliki tingkat kejahatan keuangan yang tinggi. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan juga dapat terkikis, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kerentanan Terhadap Krisis Keuangan, Aktivitas judi online yang tidak terkendali dapat meningkatkan kerentanan sistem keuangan terhadap krisis. Ketika terjadi krisis keuangan, banyak pelaku judi online yang mengalami kerugian besar dan kesulitan untuk membayar utang. Hal ini dapat memicu terjadinya gagal bayar dan berdampak negatif terhadap stabilitas sistem perbankan.

### **3.5 Peran teknologi dalam membantu perbankan mengidentifikasi pola transaksi judi online**

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning telah membuka peluang baru dalam upaya memerangi judi online. Dengan memanfaatkan algoritma yang canggih, AI mampu menganalisis volume data transaksi yang sangat besar dalam waktu singkat dan mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini memungkinkan perbankan untuk mendeteksi secara proaktif transaksi-transaksi yang terkait dengan aktivitas judi online, bahkan sebelum transaksi tersebut berdampak negatif. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif, sehingga perbankan dapat mengambil tindakan pencegahan secara tepat waktu. Dalam konteks peran krusial perbankan dalam memutus mata rantai transaksi judi online, penerapan teknologi AI menjadi semakin penting. Dengan kemampuannya dalam mengolah data secara real-time dan mengidentifikasi pola yang kompleks, AI dapat membantu perbankan mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas skema yang digunakan oleh pelaku kejahatan dan dinamika regulasi yang terus

berubah. Namun, perlu diingat bahwa penerapan AI juga memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, diperlukan juga kerangka regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dan efektif.

Salah satu teknologi yang menjanjikan adalah blockchain. Teknologi ini menawarkan tingkat transparansi dan keamanan yang tinggi dalam mencatat transaksi. Dengan setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah pada blockchain, akan lebih sulit bagi pelaku judi online untuk menyembunyikan jejak aktivitas mereka. Selain itu, penggunaan algoritma machine learning dan artificial intelligence dapat membantu perbankan dalam menganalisis sejumlah besar data transaksi secara cepat dan akurat, sehingga dapat mengidentifikasi pola-pola yang tidak biasa dan mencurigakan. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, tantangan interoperabilitas antara berbagai sistem blockchain juga perlu diatasi. Meskipun demikian, potensi teknologi blockchain dalam memerangi judi online sangat besar, terutama dalam hal meningkatkan transparansi dan memperkuat keamanan transaksi. Dengan demikian, perbankan dapat berperan lebih efektif dalam memutus mata rantai pendanaan bagi aktivitas ilegal ini. Tentunya, penerapan teknologi ini harus diiringi dengan regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis dokumen dan studi kasus pada empat bank besar di Indonesia—yaitu BRI, BNI, BCA, dan BSI—dapat disimpulkan bahwa perbankan memegang peran sentral dalam memutus mata rantai transaksi keuangan yang berkaitan dengan praktik judi online. Setiap bank memiliki strategi yang khas dalam menangani ancaman ini: BRI mengandalkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali perilaku transaksi; BNI menggunakan pendekatan waktu dan volume transaksi sebagai indikator utama; BCA memanfaatkan pemetaan jaringan transaksi dan pelacakan lokasi geografis; sedangkan BSI memperkuat prinsip *know your customer* dan *enhanced due diligence* berdasarkan nilai-nilai syariah. Temuan juga menunjukkan bahwa pemblokiran rekening menjadi langkah nyata dan masif yang telah dilakukan, dengan ribuan rekening dibekukan dalam rentang waktu Juli 2023 hingga Juni 2024. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih dibatasi oleh kompleksitas skema kejahatan yang terus berkembang, seperti penggunaan mata uang kripto, dompet digital, dan rekening pihak ketiga (rekening mule). Selain itu, keterbatasan pada sistem pelaporan lintas lembaga dan kurangnya kapasitas teknologi di beberapa bank juga menjadi tantangan yang signifikan. Perbankan sejauh ini telah menunjukkan inisiatif dalam membangun sistem deteksi dini berbasis AI, analisis big data, dan integrasi pelaporan otomatis ke PPATK. Meski demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada tiga faktor utama: (1) kekuatan koordinasi antara perbankan dan regulator seperti OJK dan Kominfo, (2) kelengkapan data blacklist situs dan rekening yang disediakan oleh PPATK, serta (3) kompetensi sumber daya manusia dalam memproses dan menindaklanjuti sinyal transaksi mencurigakan secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai mekanisme pemantauan transaksi judi online, termasuk pedoman teknis untuk bank dalam mengklasifikasikan indikator risiko. Pemerintah juga perlu menyesuaikan regulasi agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mendorong integrasi data antar lembaga melalui sistem digital nasional yang terpusat. Di sisi lain, edukasi publik juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan pentingnya peran mereka dalam melaporkan aktivitas mencurigakan.

Dengan strategi yang terintegrasi antara teknologi, kebijakan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, perbankan dapat menjadi garda terdepan yang efektif dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dari ancaman judi online.

## 5. DAFTAR RUJUKAN

### Rujukan Jurnal:

Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, *Journal of Islamic Economic Law* 2, No. 1 (2017).

Jessy Azahra(2023). Apakah Literasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku Perjudian? Studi Kasus Masyarakat Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 35-50

Kartono, Kartini. (2013). *Patologi Sosial* jilid I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kesuma, R. D. (Bab 3). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Dalam *Hukum Siber di Indonesia* (edisi ke-2, halaman 55-78). Bandung:Penerbit PT Remaja Rosdakarya

Marsela, S., Syifa, A., Pratama, F. D., & Muqfi, R. A. (2023). Persoalan penjudi dan judi online dalam analisa teori etika utilitarianisme. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1-25.

Parandita, R. A. (2023). Urgensi regulasi khusus terhadap perjudian online sebagai penyakit baru di masyarakat. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 22-28.

Purnama Putra, R., & Lyanthi, M. E. (2024). Kewenangan PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada Perjudian Online. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 320-336.

Putra, R. P., & Lyanthi, M. E. (2024). Kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas transaksi keuangan mencurigakan hasil tindak pidana pada perjudian online. [TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum](#), 1(2), 320-336.

Sinaga, O. C. S. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 18-28.

Subagyo, A. A. M., & Astuti, L. (2022). Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan perjudian online. [Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology](#), 3(3), 180-189.

### Rujukan Sumber Online :

Ahmad, A. (2023, 15 Mei). Dampak Judi Online terhadap Perekonomian Indonesia. [Kompasiana.com.](https://www.kompasiana.com/muhammadfridian1383/651ed649110fce0387269542/dampak-judi-online-terhadap-perekonomian-indonesia)  
<https://www.kompasiana.com/muhammadfridian1383/651ed649110fce0387269542/dampak-judi-online-terhadap-perekonomian-indonesia>

Alfa, N., Mawar, S., & Siahaan, N. H. (2019). Memahami transaksi keuangan mencurigakan. In PPATK. Retrieved from <https://ppatk.go.id>

- Haris, R. (2023, Oktober 13). Memutus Mata Rantai Judi Online Melalui Perbankan. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/harisrecht/65289b25110fce373407f453/memutus-mata-rantai-judi-online-melalui-perbankan>
- Hukumonline.com. (12 Januari 2024). Darurat Judi Online! Regulator Ancam Blokir Rekening hingga Blacklist Nasabah dari Perbankan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/darurat-judi-online-regulator-ancam-blokir-rekening-hingga-blacklist-nasabah-dari-perbanka-n-lt66ac590fcd55a/>
- Khoirifa Argisa Putri (2024, Agustus 2). OJK perintahkan bank blokir lebih dari 6.000 rekening terindikasi transaksi judi online. Infobanknews. <https://infobanknews.com/ojk-blokir-lebih-dari-6-000-rekening-terindikasi-judi-online/>
- Media Indonesia. (28 Juni 2024). BRI Blokir 1.049 Rekening Terkait Judi Online pada Juli 2023 hingga Juni 2024. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/681250/bri-blokir-1049-rekening-terkait-judi-online-pada-juli-2023-hingga-juni-2024>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023 Desember 16). OJK Minta Perbankan Blokir Rekening Aktifitas Kejahatan dan Judi Online. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Minta-Perbankan-Blokir-Rekening-Aktifitas-Kejahatan-dan-Judi-Online.aspx>
- PPATK. (2024, 26 Juli). GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online. Diakses pada 25 Maret 2025, dari <https://ppatk.go.id/news/react>.
- Redaksi Kompas.com. (2 Agustus 2024). Jurus OJK dan Industri Perbankan Berantas Judi "Online". Kompas. <https://money.kompas.com/read/2024/08/02/153900726/jurus-ojk-dan-industri-perbankan-berantas-judi-online>